

PERAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN VOLUNTARY DISCLOSURE

Rini Fatmawati
Dessy Widya Astuti
Djoko Suhardjanto

Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Surakarta 57126
surel: rinifatmawati1993@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9004>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 9
Nomor 1
Halaman 57-69
Malang, April 2018
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
19 September 2017
Tanggal Revisi:
25 April 2018
Tanggal Diterima:
30 April 2018

Abstrak: Peran Corporate Governance dalam Meningkatkan Voluntary Disclosure. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh sejumlah variabel *corporate governance* terhadap tingkat *voluntary disclosure*. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik dan komite audit berpengaruh terhadap tingkat *voluntary disclosure*. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tuntutan *voluntary disclosure*. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa komite audit berperan untuk menjamin kepatuhan pelaporan keuangan, termasuk *voluntary disclosure*. Meskipun demikian, dewan komisaris dan komisaris independen tidak dapat memengaruhi *voluntary disclosure* karena lebih menekankan pengawasan pada *mandatory disclosure*.

Abstract: The Role of Corporate Governance in Increasing Voluntary Disclosure. The purpose of this study is to examine the effect of a number of corporate governance variables on the level of voluntary disclosure. Data analysis was done by multiple linear regression test. This study shows that public ownership and audit committee have an effect on voluntary disclosure level. These indicate that there is an increase in voluntary disclosure demands. In addition, the audit committee acts to ensure compliance with financial reporting, including voluntary disclosure. Nevertheless, the board of commissioners and independent commissioners can't influence voluntary disclosure because it emphasizes supervision on the mandatory disclosure.

Kata kunci: corporate governance, voluntary disclosure, komite audit, dewan komisaris

Beberapa tahun terakhir terdapat masalah mengenai keluasan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI, yaitu masih relatif belum luas yang seringkali mengakibatkan kerugian bagi pemangku kepentingan. PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) adalah contoh kasus yang melanggar prinsip keterbukaan (*disclosure*). Kasus berikutnya, Basari (2013) mengemukakan mengenai masalah keterbukaan informasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Davomas Abadi Tbk. Skandal tersebut jelas melanggar prinsip keterbukaan informasi secara penuh dan konsistensi (*full disclosure*) di pasar modal. Peraturan mengenai keterbukaan informasi bersandar pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur mengenai Pasar Modal menyebutkan bahwa masyarakat

berhak mengetahui kondisi perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian pada investor. Dari fenomena tersebut peran informasi sebagai produk utama yang dihasilkan melalui laporan keuangan perusahaan sangat penting sebagai tanda atau sinyal yang mempengaruhi keputusan investasi pihak di luar perusahaan dan informasi yang diberikan kepada publik lebih komprehensif mengenai kondisi perusahaan. Kasus tersebut juga mengindikasikan terjadinya asimetri informasi antara *principles* dengan *agent*. Oleh sebab itu pengguna informasi sangat membutuhkan informasi yang transparan, terutama pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Informasi yang transparan dan lebih komprehensif akan membantu pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkembangan in-

vestasi masa depan pada perusahaan terkait.

Penelitian-penelitian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *voluntary disclosure* sudah banyak, misalnya Ibrahim, Solikahan, & Widyatama (2015), Muawanah (2014), Muttakin, Khan, & Bellal (2015), serta Yu, Li, & Yang (2017). Penelitian tersebut menemukan hasil yaitu proporsi kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh pada keterbukaan informasi. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Hui & Matsunaga (2015) dan Kim (2015) bahwa kepemilikan publik mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan informasi. Detthamrong, Chancharat, & Vithessonthi (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh masyarakat yang semakin tinggi akan berakibat pada tekanan yang tinggi untuk perusahaan agar mengungkapkan informasi yang lebih baik. Kepemilikan saham oleh masyarakat dengan persentase yang lebih besar juga akan mendorong perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan mengungkapkan informasi yang lebih banyak yang bertujuan memasarkan sahamnya dan untuk meminimalkan tekanan dari pembuat peraturan (pemerintah).

Penelitian Octavia (2017) dan Kurnianto, Sutrisno, & Saraswati (2016) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, dan *leverage* memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap kualitas *voluntary disclosure*. Akan tetapi, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada kualitas *voluntary disclosure*. Kebaruan penelitian ini menggunakan variabel struktur kepemilikan dan dewan komisaris dengan proksi yang berbeda yang diduga berpengaruh positif terhadap luasnya *voluntary disclosure*. Selain itu, sektor perusahaan dan periode pengamatan menjadi kebaruan penelitian ini. Dalam membuat indeks *voluntary disclosure* suatu instrumen dibutuhkan sehingga dapat menggambarkan informasi secara jelas dan detail pada masing-masing item laporan keuangan sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini menggunakan indeks Wallace dengan melakukan perbandingan antara beberapa informasi yang disajikan oleh perusahaan dengan beberapa informasi yang sebaiknya disajikan oleh perusahaan. Daftar *item* pengungkapan *voluntary disclosure* mengacu pada Peraturan OJK Nomor.29/PJOK.04/2016.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena *voluntary disclosure* memiliki kandungan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi keputusan penggunanya serta dapat menurunkan asimetri informasi. Hal ini menunjukkan perusahaan berminat untuk menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan untuk memberi sinyal positif bagi perusahaan. *Signalling theory* mendasari pengungkapan sukarela karena sinyal yang berupa informasi mengenai usaha yang telah dilakukan pihak manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal tersebut dapat berupa informasi lain yang menyatakan perusahaan lebih baik daripada perusahaan lain. Manajemen berupaya mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya akan menarik calon investor jika berupa berita bagus. Pengungkapan sukarela yang tertuang pada *annual report* salah satu upaya memberikan sinyal positif kepada pengguna informasi karena didalamnya terdapat informasi keuangan dan non-keuangan.

Sample frame yang digunakan adalah perusahaan tambang yang terdaftar di BEI selama 2014-2016. Pertimbangan memilih perusahaan pertambangan karena perusahaan semacam ini dipercaya membutuhkan image yang lebih baik dari investor dan pemangku kepentingan (Kim, 2015). Penelitian Sankara, Lindberg, & Razaki (2016) mengungkapkan bahwa industri pertambangan memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan sektor industri lainnya. Karakteristik dan sifat perusahaan pertambangan yaitu untuk berinvestasi memerlukan biaya yang besar dengan sarat risiko dan jangka waktu yang lama, serta tingginya ketidakpastian, karena perusahaan pertambangan juga merupakan perusahaan yang dalam kegiatannya melakukan pengelolaan sumber daya dan transaksi ekonomi yang melibatkan banyak pihak yaitu pemangku kepentingan (*supplier*, kreditur, konsumen, calon investor, dan lain-lain). Perusahaan pertambangan juga melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pihak sehingga cenderung berisiko dan tekanan yang timbul juga banyak. Kondisi tersebut mengharuskan perusahaan pertambangan memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak. Dengan *voluntary disclosure* informasi yang dihasilkan dapat membantu untuk pengambilan keputusan investa-

si. Periode penelitian tahun 2014 sampai dengan 2016 dipilih karena pada periode tersebut industri pertambangan mengalami naik turun seiring adanya gejolak ekonomi di Indonesia (www.worldbank.org, 2014).

Sepanjang tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan ekonomi melemah dan perusahaan tambang pun ikut terkena dampak (www.ekonomi.kompas.com). Gejolak politik yang terjadi seringkali membuat menurunnya kepercayaan pada para investor yang mengakibatkan juga tertundanya sejumlah proyek dan investor baru. Tak hanya itu, rupiah pun terus melemah menyebabkan pemerintah menurunkan subsidi bahan bakar minyak. Walaupun harga menurun, sebagian besar produsen Indonesia tetap meningkatkan produksi guna menjaga kestabilan pada konsumen. Dengan berjalannya waktu perekonomian di Indonesia, khususnya sektor pertambangan, mulai meningkat. Pada tahun 2015 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan bahwa sektor pertambangan menyerap investasi terbesar pada periode Januari-Maret 2015 yaitu sebesar Rp 15 triliun atau 12% dari realisasi penanaman modal kuartal I tahun 2015 (Kim, 2015). Dari peristiwa tersebut diharapkan perusahaan dapat lebih mengungkapkan secara sukarela informasi risiko perusahaannya yang disajikan dalam annual report. Hal tersebut guna memudahkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan investasi. Tujuan penelitian ini yaitu menguji variabel struktur kepemilikan dan dewan komisaris sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi luas *voluntary disclosure*. Struktur kepemilikan diwakili oleh kepemilikan publik, sedangkan dewan komisaris diwakili oleh jumlah anggota dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit di dalam suatu perusahaan.

METODE

Penelitian ini menguji teori dengan menggunakan variabel-variabel penelitian secara kuantitatif, selanjutnya mengolah data dengan prosedur statistik sehingga dapat disebut dengan penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan sebab-akibat atau kausal di antara variabel penelitian untuk dilakukan pengujian terhadap teori (Winarno, 2007). Data panel digunakan dalam penelitian ini yaitu kolaborasi antara *data time series* (observasi beberapa periode) dan

cross section (pengamatan satu periode).

Populasi yang digunakan yakni semua perusahaan tambang yang terdaftar di BEI untuk periode 2014-2016. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam menentukan *sample frame* penelitian. Maksud dilakukan penelitian ini yakni menguji variabel pengungkapan (*disclosure*) sehingga dibutuhkan perusahaan yang melakukan *voluntary disclosure* melalui laporan keuangan dan laporan tahunan dan dapat diakses melalui website. Sample design yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyelidiki pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang peneliti ajukan. Variabel dependen adalah *voluntary disclosure* yang diprediksi oleh variabel independen adalah kepemilikan publik, dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan komite audit. Kemudian *sample frame* yang digunakan terdiri dari 33 perusahaan pertambangan yang telah melalui kriteria dan terdaftar di BEI periode 2014-2016 (3 tahun). Jadi, *sample size* dalam penelitian ini berjumlah 99 sampel laporan tahunan perusahaan. Sumber data menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui akses *website* resmi dari tiap-tiap perusahaan yang termasuk *sample frame* dalam penelitian, juga didapat dengan mengakses situs resmi www.idx.co.id.

Proporsi kepemilikan publik adalah variabel independen yang pertama yang menunjukkan persentase kepemilikan masyarakat di luar dari kepemilikan manajerial dan institusional (Fitria, 2012). Penelitian ini menekankan pada kepemilikan saham publik sesuai dengan penelitian Arafat, Black, & Yurtoglu (2017) serta Lee, Lee, & Wang (2017). Kepemilikan saham publik diprosikan dari perbandingan kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat dan total saham yang dimiliki perusahaan yang beredar kemudian dikalikan 100% (Peters & Romi, 2015).

Variabel independen yang kedua yaitu jumlah dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris yang menjalankan tugas dan fungsi *monitoring* perusahaan secara efektif di dalam suatu perusahaan (Sharma, 2014). Penelitian ini menggunakan *proxy* jumlah dewan komisaris di dalam suatu perusahaan yang berasal dari *intern/ekstern* perusahaan atau yang independen dalam suatu perusahaan dalam menentukan ukuran dewan komisaris. Hal ini tidak berbeda dengan penelitian Abdallah & Ismail (2017) dan Dembo & Rasaratnam (2014).

Variabel yang ketiga yaitu persentase komisaris independen yakni bagian dari anggota dewan komisaris yang independen atau tanpa mempunyai hubungan/afiliasi dengan pihak pengelola perusahaan, dan pemilik saham mayoritas, serta tidak ada hubungan apa pun yang dapat mempengaruhi tindakan independen dalam hal untuk tujuan perusahaan (Baber, Liang, & Zhu, 2012). Pengukuran proporsi komisaris independen menggunakan Indikator yang tidak berbeda dengan penelitian Abdallah & Ismail (2017), Murcia (2016), dan Huang & Kang (2017) yaitu dengan perbandingan proporsi jumlah anggota komisaris yang independen dalam bentuk persentase terhadap jumlah anggota dewan komisaris di suatu perusahaan dengan mengalikan 100%.

Variabel yang keempat adalah jumlah komite audit yaitu semua member komite audit di dalam suatu perusahaan (Elfeky, 2017). Peraturan mengenai eksistensi komite audit dijelaskan pada Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 yaitu perusahaan diwajibkan memiliki komite audit yang beranggotakan seorang komisaris independen dan paling sedikit dua anggota dari eksternal perusahaan dan/atau tidak terafiliasi dengan perusahaan (di luar emiten). Pengukuran komite audit dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Huang & Kang (2017) yakni dengan menggunakan jumlah seluruh anggota komite audit pada masing-masing perusahaan.

Variabel dependen atau variabel bergantung pada penelitian ini adalah *voluntary disclosure* perusahaan yang dipublikasikan melalui *annual report* perusahaan, yang diprosikan dengan *voluntary disclosure index* (Abdullah, Percy, & Stewart, 2015). Indeks pengungkapan dihitung dengan pembagian antara total *item* pengungkapan sukarela oleh perusahaan terhadap total *item* yang diharapkan diungkapkan oleh perusahaan (Ibrahim, Solikahan, & Widyatama, 2015). Daftar *item voluntary disclosure* disesuaikan dengan standar peraturan di Indonesia yaitu Peraturan OJK Nomor.29/PJOK.04/2016, sesuai dengan penelitian Diallo (2017) dan Harun (2013). Daftar *item voluntary disclosure* tersebut meliputi pengungkapan informasi umum dan strategi, data keuangan, informasi masa depan, dan pengungkapan sosial serta informasi tentang direksi.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol untuk mengendalikan *causal effect* antara variabel dependen dan variabel inde-

penden agar model penelitian lebih lengkap dan lebih baik (Bushee, Carter, & Gerakos, 2014). Hal ini agar tidak ada bias atau kesalahan yang konsisten dalam penelitian. *Size* perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengurangi perbedaan secara signifikan *size* perusahaan yang terlalu besar dengan perusahaan yang terlalu kecil bertujuan untuk membuat data total aset terdistribusi normal, sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Liyundra, Sayekti, & Roziq, 2017). Ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya adalah dengan total aktiva, *net sales*, dan *market capitalization*. *Size* perusahaan dalam penelitian ini diprosikan dari jumlah aset perusahaan dengan *natural logarithm* dengan pertimbangan lebih konstan daripada nilai *market capitalization* dan *net sales* (Duong, Kang, & Salter, 2016).

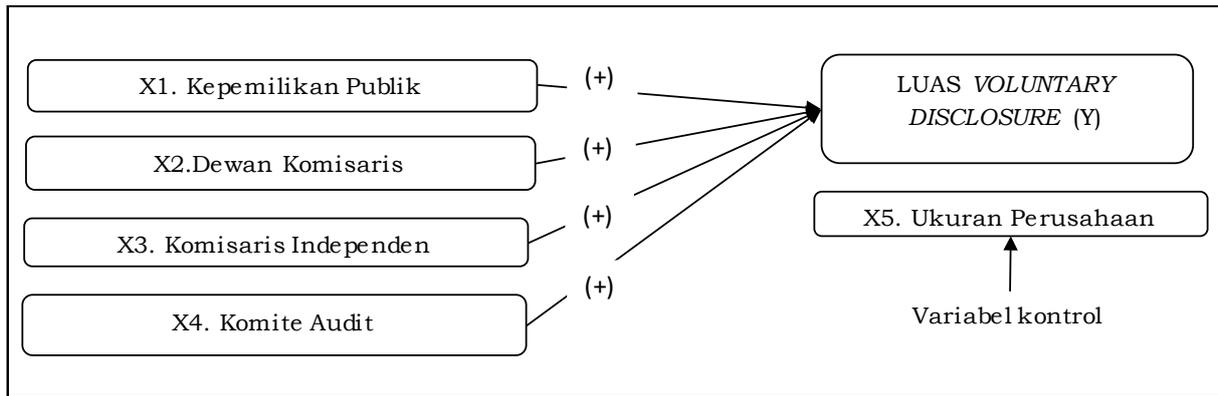
Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan angka menjadi pernyataan yang memudahkan pemahaman pembaca karena penyajiannya lebih ringkas pada tabel sederhana (Murcia, 2016; Peters & Romi, 2015). Uji statistik deskriptif menghasilkan mean, median, standar deviasi, nilai terendah, dan nilai tertinggi. Penelitian ini menguji pengaruh variabel-variabel penelitian dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda, karena untuk menguji pengaruh atau memprediksi variabel-variabel independen pada variabel dependen yang hanya berjumlah satu. Program SPSS tipe 21 untuk *windows* digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel secara statistik. Pengujian regresi linier berganda harus lolos pengujian asumsi klasik yang dimaksud menguji kualitas data seperti kevalidan data penelitian, konsisten, *unbiased*, dan taksiran koefisien regresi efisien. Pengujian asumsi klasik antara lain uji normaitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Model persamaan regresi berganda dalam menguji pengaruh atau memrediksi variabel-variabel independen pada variabel dependen yang hanya berjumlah satu, dalam penelitian ini α ditentukan sebesar 0,05, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{VOLDISC} = \alpha + \beta_1\text{PUBLIK} + \beta_2\text{DEKA} + \beta_3\text{KOMIND} + \beta_4\text{KOMAUD} + \beta_5\text{SIZE} + \epsilon$$

Keterangan:

VOLDISC = Luas *Voluntary disclosure*
 α = Konstanta



Gambar 1. Kerangka Konseptual

- β_{1-5} = Koefisien Regresi
- PUBLIK = Kepemilikan Publik
- DEKA = Jumlah Dewan Komisaris
- KOMIND = Persentase Komisaris Independen
- KOMAUD = Jumlah Komite Audit
- SIZE = Size Perusahaan
- ε = error term

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan persentase variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien penentu/determinasi berkisar antara angka nol dan angka satu, artinya jika angka R^2 kecil mendekati angka nol, maka variasi variabel independen menunjukkan persentase sangat terbatas mempengaruhi variabel dependen. Angka R^2 yang besar mendekati angka satu menunjukkan variasi variabel independen berkontribusi besar mempengaruhi variabel dependen. Angka *Adjusted R²* digunakan sebagai nilai koefisien penentu pada penelitian ini.

Pengujian statistik F akan menunjukkan apakah keempat variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian statistik nilai F dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi. Angka probabilitas signifikansi $<0,05$ artinya keempat variabel independen secara bersamaan menjelaskan

atau mempengaruhi satu variabel dependen secara signifikan. Nilai probabilitas signifikansi $>0,05$ artinya keempat variabel independen secara simultan signifikan menjelaskan atau mempengaruhi satu variabel dependen.

Uji statistik t menjelaskan besar variabel independen individual mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen yang hanya berjumlah satu. Pengujian statistik t atau *t-test* dalam penelitian ini dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikansi. Angka probabilitas signifikansi $<0,05$ berarti menunjukkan satu variabel independen mempengaruhi atau sebagai penjelas yang signifikan terhadap satu variabel dependen. Angka probabilitas signifikansi $>0,05$ berarti menunjukkan satu variabel independen tidak mempengaruhi atau bukan penjelas yang signifikan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode pengamatan yaitu tahun 2014-2016 dijadikan sampel penelitian yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis dan didapatkan sejumlah 99 pengamatan berupa laporan tahunan perusahaan pertambangan selama 3 tahun yaitu periode 2014-2016 yang digunakan dalam penelitian ini. Pene-

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel

Uraian	Jumlah
Perusahaan sektor pertambangan terdaftar di BEI selama 2014-2016 (42x3th=126)	126
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan periode 2014-2016 secara lengkap (9x3th=27)	-27
Perusahaan yang terpilih menjadi sampel (33x3th=99)	99

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	Min	Max	Rata-Rata	Standar Deviasi
<i>VOLDISC</i>	81,82	100	92,1	3,81
<i>PUBLIK</i>	3	70,58	32	0,44
<i>DEKA</i>	2	9	4,7	1,74
<i>KOMIND</i>	33,33	66,67	44,09	10,34
<i>KOMAUD</i>	2	5	3,06	0,6
<i>SIZE</i> (jutaan)	164.987	87.633.045	1.272.567	1.847.342

litian ini menguji data dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan *software* SPSS versi 21.0 for windows. Adapun sampel lengkap yang dijadikan objek analisis dapat dilihat pada Tabel 1.

Statistik deskriptif menghasilkan nilai rata-rata, nilai paling tinggi, nilai paling rendah, dan standar deviasi untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 menampilkan statistik deskriptif serta semua variabel penelitian yang meliputi baik variabel independen maupun variabel dependen. Berdasarkan uji statistik deskriptif variabel dependen *voluntary disclosure* menunjukkan nilai minimum adalah 81,82 artinya perusahaan paling sedikit mengungkapkan 81,82% dari 33 *item voluntary disclosure* yaitu PT Cita Mineral Investindo, Tbk (CITA). Nilai maksimum menunjukkan 100, artinya perusahaan mengungkapkan paling banyak 100% dari 33 *item voluntary disclosure* yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS). Rata-rata menunjukkan bahwa indeks *voluntary disclosure* sebesar 92,10 dengan standar deviasi sebesar 3,81, berarti rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia mengungkapkan sebesar 92,10% *item* dari 33 *item voluntary disclosure*. Data menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia telah melakukan *voluntary disclosure* cukup tinggi untuk memenuhi informasi kepada publik. *Voluntary disclosure* yang informatif mengacu pada Peraturan OJK Nomor.29/PJOK.04/2016 diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan, sehingga mengurangi informasi yang asimetri dan memberikan sinyal positif bagi pengguna informasi dan membantu investor dalam mempengaruhi keputusan investasi.

Statistik deskriptif untuk variabel independen kepemilikan publik menunjukkan nilai minimum 3% yaitu PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), nilai maksimal 70,58%

PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dan *mean* 32% yang berarti rata-rata kepemilikan publik pada perusahaan pertambangan. Hal ini mengartikan kepemilikan publik masih relatif kecil dan terkonsentrasi. Kepemilikan publik yang semakin besar diharapkan perusahaan dapat memberikan informasi yang lengkap agar meminimalisasi informasi yang asimetri dengan memberikan sinyal positif untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan kepada investor.

Nilai minimum ukuran dewan komisaris (DEKA) pada perusahaan pertambangan di Indonesia menunjukkan 2 orang komisaris pada perusahaan yaitu PT Ratu Prabu Energi Tbk (EMIS), PT ATPK Resources Tbk (ATPK), dan PT J Resources Asia Pasifik (PASB). Nilai maksimum menunjukkan 9 orang komisaris yaitu PT Vale Indonesia Tbk, dan *mean* 4,70 yang mengartikan rata-rata perusahaan pertambangan memiliki 4-5 orang dewan komisaris di dalam perusahaannya. Peraturan mengenai PT dituangkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 diperjelas di pasal 108(5) yaitu mengharuskan perusahaan mempunyai minimal dua orang sebagai anggota dewan komisaris. Hasil data statistik deskriptif menyimpulkan bahwa tidak ada perusahaan yang bertentangan dengan undang-undang terkait kuantitas dewan komisaris di dalam suatu perusahaan. Ukuran/jumlah dewan komisaris merupakan salah satu efektivitas peranan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya mengawasi dan menasihati perusahaan.

Proporsi komisaris independen (KOMIND) menunjukkan nilai minimum 33,33, artinya perusahaan paling sedikit memiliki proporsi komisaris independen 33,33% dari jumlah anggota dewan komisaris yaitu PT Harum Energy Tbk (HRUM). Nilai maksimum menunjukkan 66,67, artinya perusahaan paling banyak memiliki komisaris independen 66,67% dari jumlah anggota dewan komisaris yaitu PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Nilai rata-rata sebesar 44,09 dengan standar

deviasi 10,34 cukup tinggi dan variatif, artinya perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki rata-rata proporsi komisaris independen sebesar 44,09% dari semua anggota dewan komisaris yang ada di dalam perusahaan. Proporsi komisaris independen juga terbukti menunjukkan peningkatan efektivitas kinerja dewan komisaris dalam mengemban tugas utama yaitu fungsi pengawasan (Fama & Jensen, 1983), sehingga diharapkan persentase komisaris independen yang lebih tinggi juga berdampak semakin efektif fungsi monitoring di dalam perusahaan.

Komite audit (KOMAUD) menunjukkan nilai minimum 2, artinya paling sedikit perusahaan mempunyai 2 orang anggota komite audit dalam perusahaan yaitu PT Harum Energy Tbk (HRUM). Nilai maksimum menunjukkan 5, artinya paling banyak perusahaan mempunyai 5 orang anggota komite audit yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS). Rata-rata menunjukkan 3,06 dengan standar deviasi sebesar 0,6 sangat kecil dan variatif, artinya rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia mempunyai 3 orang member komite audit dalam perusahaannya. Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 mengatur komite audit di dalam perusahaan paling tidak ada seorang Komisaris Independen dan paling sedikit dua anggota lain berasal dari eksternal perusahaan atau tidak terafiliasi dengan perusahaan (luar emiten). Dari hasil data di atas terungkap bahwa tidak ada perusahaan pertambangan di Indonesia yang melanggar peraturan tersebut karena semua perusahaan sampel mempunyai jumlah anggota komite audit yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Jumlah komite audit menentukan efektifitas kerja dan kinerja komite audit (Kusumah & Manurung, 2017). Oleh karena itu, diharapkan semakin banyak anggota komite audit kinerjanya juga semakin efektif.

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah size perusahaan dengan merujuk pada penelitian terdahulu. Ukuran perusahaan menunjukkan nilai minimum 164.987, artinya paling sedikit perusahaan memiliki total aset 164 Miliar yaitu PT Harum Energy Tbk. Nilai maksimal menunjukkan 87.633.045, artinya perusahaan paling banyak mempunyai total aset sebesar 87 Triliun yaitu PT Adaro Energy Tbk. Rata-rata menunjukkan 1.272.567, artinya rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia mempunyai total aset sebesar 1,3 Triliun yang tergolong klasifikasi perusahaan be-

sar. Ukuran perusahaan yang semakin besar, maka makin besar tuntutan *voluntary disclosure* yang menghasilkan informasi yang relevan agar meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan bagi pengguna.

Kualitas data diuji dengan analisis model regresi linier berganda sehingga estimasi hasil yang signifikan penelitian ini dapat dimanfaatkan secara representatif. Model regresi dikatakan baik dan tidak menyimpang apabila lulus dari pengujian asumsi klasik dasar regresi yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Ghozali, 2013). *Normality test data* dilakukan *Kolmogrov-Smirnov (K-S) Test* dengan hasil menunjukkan 0,950 dan tingkat signifikan pada 0,327, artinya jika $>0,05$ menunjukkan data berdistribusi normal. Uji multikolinieritas memperlihatkan tidak ada hubungan di antara keempat variabel independen. Uji autokorelasi memperlihatkan angka probabilitas sebesar 0,189 yaitu $>0,05$. Hasil ini menunjukkan tidak ada autokorelasi di antara keempat variabel independen pada model regresi dalam penelitian. Uji heteroskedastisitas menunjukkan pola yang teratur sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini sudah lulus uji asumsi klasik sehingga persamaan regresi berganda layak dilanjutkan. Teknik analisis regresi linier berganda adalah teknik analisis data yang dipakai untuk memprediksi variabel-variabel independen sebagai penjelas terhadap satu variabel dependen. Model regresi linier berganda menghasilkan informasi di antaranya model persamaan linier berganda, nilai koefisien determinasi (R^2), dan pengujian statistik (Uji t dan uji F). Tabel 3 berikut ini memperlihatkan hasil statistik perhitungan model regresi linier berganda.

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut.

$$\text{VOLDISC} = 75,243 + 1,889\text{PUBLIK} + 0,125\text{DEKA} - 6,951\text{KOMIND} + 2,508\text{KOMAUD} + 1,362\text{SIZE}.$$

Pada Tabel 3 dapat dilihat koefisien penentu/determinasi dilihat dari nilai *Adjusted R2* sebesar 0,279. Hasil ini menunjukkan sebesar 27,9% variabel dependen *voluntary disclosure* dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yaitu kepemilikan publik, jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah komite audit, dan *size* perusahaan sebagai variabel kontrol. Selebihnya sebesar 72,1% diprediksi oleh sebab/faktor selain

Tabel 3 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	t	Signifikansi
Konstanta	75,243	10,43	0
PUBLIK	1,889	1,985	0,04
DEKA	0,125	0,553	0,581
KOMIND	-6,951	-1,869	0,065
KOMAUD	2,508	4,383	0,01
SIZE	1,362	2,379	0,019
R ²	0,317		
Adjust R ²	0,279		
F Statistic	8,335		
P	0		

di luar model regresi seperti dalam penelitian ini. Variabel independen yang berjumlah lima secara simultan atau bersama-sama memiliki kontribusi berpengaruh atau sebagai penjelas terhadap *voluntary disclosure* sebesar 27,9%, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain selain model penelitian ini.

Nilai statistik F untuk variabel independen menunjukkan angka 8,335 dengan p menunjukkan 0,000. Dilihat dari angka $p < 0,05$, maka model regresi dapat memprediksi tingkat *voluntary disclosure* dan kelima variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu *voluntary disclosure* atau dapat dikatakan model penelitian *fit*.

Uji t mengukur pengaruh satu variabel independen secara tunggal mempengaruhi atau menjelaskan variabel independen. Uji t dapat dilihat melalui nilai probabilitas signifikansi yaitu dengan melihat perbandingan antara angka signifikansi nilai t dari hasil pengujian regresi berganda dengan nilai signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini. Nilai signifikansi yang dipakai penelitian ini adalah 0,000, artinya jika nilai signifikan $< t$, menunjukkan variabel independen mempengaruhi secara signifikan pada variabel dependen, dan jika nilai signifikansi $> t$, menunjukkan variabel independen bukan penjelas secara signifikan atau tidak mempengaruhi variabel dependen. Nilai signifikansi pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel independen dengan simultan menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen dengan signifikan.

Berdasarkan data pada Tabel 3, pengujian statistik kepemilikan terhadap koefisien regresi menunjukkan angka t sebesar 1,985 serta angka p menunjukkan 0,040. Angka $p < 0,05$ mengartikan hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan kepemilikan publik

mempengaruhi *voluntary disclosure* yang mengarah positif. Temuan ini kongruen dengan penelitian terdahulu yaitu Narayanaswamy, Raghunandan, & Rama (2012), Hui & Matsunaga (2015), Kim (2015), Chapple & Truong (2015), dan Rose (2016) dengan hasil proporsi kepemilikan publik mempengaruhi luas *voluntary disclosure*. Kepemilikan saham oleh publik mendorong perusahaan mengungkapkan informasi yang lebih komprehensif pada laporan tahunan/*annual report*. Logika berpikir yaitu publik atau pihak di luar perusahaan yang memiliki kepemilikan saham menginginkan informasi yang komprehensif mengenai perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya. Selain itu, investor mampu mengawasi dan memantau kegiatan manajemen sehingga kepentingannya dalam perusahaan dapat terpenuhi. Publik yang menginginkan informasi yang komprehensif, mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang komprehensif salah satunya *voluntary disclosure* yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan mengingat karakteristik perusahaan pertambangan yang memerlukan biaya besar, risiko, waktu lama, dan ketidakpastian yang tinggi.

Hasil analisis regresi (Tabel 3) ukuran dewan komisaris menghasilkan angka t menunjukkan 0,553 serta angka p menunjukkan 0,581. Angka $p > 0,05$ menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak signifikan mempengaruhi atau bukan penjelas *voluntary disclosure*. Temuan ini tidak sesuai dengan penelitian Liu (2015), Octavia (2017), dan Kurnianto, Sutrisno, & Saraswati (2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempengaruhi tingkat *voluntary disclosure* secara positif. Penelitian ini tidak berbeda dengan hasil Liang, Chen, & Chen (2016) dengan hasil ukuran dewan komisa-

ris tidak mempengaruhi terhadap luas *voluntary disclosure*. Hal ini karena upaya dari pihak manajemenlah yang menyediakan informasi yang bersifat sukarela untuk memberikan sinyal positif dan menunjukkan perusahaannya lebih baik daripada perusahaan lain untuk mempengaruhi keputusan investasi calon investor dan juga berupaya merealisasikan keinginan pemilik.

Pengujian statistik terhadap koefisien regresi menunjukkan hasil nilai t sebesar -1,869 dan angka p sebesar 0,065. Angka p yang melebihi 0,05 menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen secara statistik tidak mempengaruhi atau bukan penjelas yang signifikan pada *voluntary disclosure*. Temuan ini tidak kongruen dengan penelitian terdahulu seperti Abdallah, Hassan, & McClelland (2015), Ntim (2016), dan Octavia (2017) dengan hasil menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen mempengaruhi *voluntary disclosure* secara signifikan dengan arah yang positif. Penelitian terdahulu yang selaras dengan temuan ini adalah penelitian Olsen & Stekelberg (2016) yang menunjukkan bahwa persentase komisaris independen tidak mempengaruhi luas *voluntary disclosure*.

Alasan yang mendasari bahwa proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi *voluntary disclosure* adalah perusahaan dengan proporsi komisaris independen lebih tinggi tidak menjamin tingkat *voluntary disclosure* yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan komisaris independen lebih berperan memperhatikan mengenai pengungkapan wajib dibanding *voluntary disclosure*. Proporsi dewan komisaris independen yang tinggi tidak selalu menunjukkan independensi dan profesionalitas yang tinggi karena principles memegang kendali perusahaan sehingga proporsi dewan komisaris independen yang ada di dalam perusahaan tidak dapat berkinerja secara optimal. Selain itu, tingginya presentase komisaris independen bila tidak mampu disertai dengan mempertahankan independensi, maka kinerja mereka tidak akan efektif. Perusahaan yang memenuhi kriteria keberadaan proporsi komisaris independen sebesar 30% memungkinkan hanyalah formalitas dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Kebijakan perusahaan dalam menempatkan proporsi komisaris independen sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas operasional perusahaan tambang dengan ketidakpastian yang tinggi dan tentunya memperhatikan

keefektifan dalam pengambilan keputusan.

Keberadaan komisaris independen memang sudah diatur jumlahnya oleh OJK, tetapi praktik dalam perusahaan menunjukkan mekanisme yang jelas mengenai bagaimana pemegang saham memilih komisaris independen belum ada sehingga meskipun ada dalam perusahaan penunjukkannya tidak diketahui. Kondisi tersebut, dikhawatirkan ada kemungkinan bagi beberapa pihak untuk memperluas kesempatan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) atau memungkinkan penunjukkan komisaris independen ternyata ada relasi afiliasi dengan perusahaan, sehingga penerapan prinsip-prinsip GCG akan melemah. Kemungkinan selanjutnya adalah keberadaan komisaris independen hanyalah untuk menaati aturan yang telah ditetapkan tanpa mempedulikan efektifitas fungsinya. Hal ini dapat terjadi karena penunjukan komisaris independen yang berasal dari eksternal perusahaan kurang memiliki pengalaman dalam menangani masalah-masalah khusus yang dihadapi perusahaan.

Pengujian statistik terhadap koefisien model regresi menunjukkan nilai t untuk ukuran komite yaitu 4,383 dan nilai p yaitu 0,010. Nilai $p < 0,05$ yang berarti ukuran komite audit mempengaruhi secara signifikan dengan arah yang positif terhadap variabel independen atau dapat diartikan merupakan penjelas dari *voluntary disclosure*. Temuan ini tidak berbeda dengan penelitian-penelitian lain terdahulu seperti Liu (2015) dan Brada (2016) yang menyebutkan ukuran komite audit mempengaruhi luas *voluntary disclosure* secara positif dan signifikan. Adanya komite audit di dalam perusahaan mendukung prinsip pertanggungjawaban/*responsibility* dalam menerapkan *corporate governance* mewajibkan perusahaan memberikan informasi yang transparan dan lengkap. Peran Komite audit terlampau penting dalam menjalankan fungsinya yaitu mengawasi berbagai aspek organisasi meliputi *checking* dan *monitoring* dalam proses pengendalian intern serta kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan. Peran komite audit tidak terlepas dalam hal peningkatan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan serta menjamin *intern control system* yang lebih baik. Perusahaan pertambangan rata-rata mempunyai 3 sampai 4 orang member komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah menaati Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 untuk

ukuran komite audit yang efektif. Ukuran komite audit yang besar menjadikan kinerja semakin efektif sehingga mendukung perusahaan untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan melalui *voluntary disclosure* yang berguna bagi pengguna untuk memusatkan berinvestasi pada perusahaan mengingat tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Size perusahaan yang digunakan sebagai pengontrol hubungan baik variabel independen maupun variabel independen, signifikan berpengaruh mengarah positif terhadap luas *voluntary disclosure*. Pengujian statistik terhadap koefisien model regresi menunjukkan hasil nilai *t* untuk *size* perusahaan sebesar 2,379 dengan nilai *p* adalah 0,019. Nilai *p* < 0,05 ini berarti ukuran perusahaan mempengaruhi *voluntary disclosure*. Hasil tersebut menunjukkan keselarasan dengan penelitian Narayanaswamy, Raghunandan, & Rama (2012), Liu (2015), Octavia (2017) yang memperlihatkan ada hubungan mengarah positif dan signifikan antara *firm size* pada *voluntary disclosure*. Chauhan, Lakshmi, & Dey (2016) menyatakan perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan para *stakeholder*-nya sehingga permintaan informasi juga meningkat. Selain itu, aset perusahaan yang besar dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi bersifat sukarela yang tinggi untuk menarik para investor. Perusahaan besar seperti perusahaan pertambangan menjadi perhatian publik dan *stock market* karena berkaitan erat dengan keputusan investasi yang akan diambil mengenai prospek ke depan perusahaan mengingat *image* perusahaan tambang memerlukan *image* yang lebih baik berkaitan dengan ketidakpastian yang tinggi. Hal ini memberi indikasi bahwa perusahaan dengan *size* besar akan memberikan informasi yang lebih komprehensif apabila perbandingannya dengan perusahaan dengan *size* yang lebih kecil sebagai upaya perusahaan untuk mencapai akuntabilitas publik.

SIMPULAN

Temuan dalam penelitian ini adalah semakin meningkat porsi kepemilikan publik, tuntutan publik untuk mendorong perusahaan meningkatkan *voluntary disclosure* untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan yang berguna bagi pengguna juga semakin besar. Hasil menunjukkan keberadaan dewan komisaris belum menunjukkan kinerja yang efektif dalam melakukan

tugas utama pengawasan karena fungsi pengawasan yang efektif seharusnya meningkatkan *voluntary disclosure* agar pelaporan keuangan lebih kredibel bagi pengguna. Hasil juga mengindikasikan independensi dewan komisaris yang independen dipertanyakan, karena tidak meningkatkan *voluntary disclosure*. Hal ini memungkinkan penunjukan komisaris independen masih terafiliasi dengan perusahaan sehingga kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Padahal, seharusnya keberadaannya mampu meningkatkan *voluntary disclosure* perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa sebaiknya perusahaan memerhatikan jumlah komite audit. Jumlah komite audit menunjukkan keefektifan kinerja dalam hal pengawasan yang berdampak pada luasnya *voluntary disclosure* dalam rangka menghasilkan informasi yang lebih komprehensif yang berguna bagi pengguna.

Simpulan menunjukkan bahwa salah satu mekanisme *corporate governance* terhadap *voluntary disclosure* adalah kepemilikan saham mayoritas yang dapat diketahui pada laporan tahunan perusahaan. Efektivitas pengendalian terhadap proses penyusunan laporan tahunan dapat didukung dengan adanya dewan komisaris yang independen, kompeten dalam bidang keuangan, dan kredibel baik secara individu maupun secara institusi. OJK hendaknya membuat peraturan yang jelas tentang pemilihan dewan komisaris baik dari dalam maupun luar perusahaan agar independensi terjaga dan informasi dari *voluntary disclosure*/pengungkapan sukarela pada laporan tahunan dapat dipercaya dan akurat sesuai dengan konsep GCG, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) atau dapat disingkat dengan (TARIF) karena belum adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana proses penunjukan komisaris oleh pemegang saham sehingga berpotensi adanya praktik KKN. Perusahaan hendaknya juga memerhatikan jumlah anggota komite audit karena dapat membantu pengawasan untuk meningkatkan transparansi perusahaan, termasuk *voluntary disclosure* yang menghasilkan informasi yang lebih komprehensif bagi pengguna. Hasil penelitian yang telah diperoleh tidak lepas dari keterbatasan. Maka, saran untuk *future research* antara lain mekanisme penerapan GCG yang efektif seharusnya lebih kompleks sehingga lebih andal dan menggam-

barkan variabel GCG seperti pendidikan, jumlah *meeting*, dan pengalaman kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdallah, A. L. N., & Ismail, A. K. (2017). Corporate Governance Practices, Ownership Structure, and Corporate Performance in the GCC Countries. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 46, 98-115. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2016.08.004>
- Abdallah, A. A. N., Hassan, M. K., & McClelland, P. L. (2015). Islamic Financial Institutions, Corporate Governance, and Corporate Risk Disclosure in Gulf Cooperation Council Countries. *Journal of Multinational Financial Management*, 31, 63-82. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2015.02.003>
- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2015). Determinants of Voluntary Corporate Governance Disclosure: Evidence from Islamic Banks in the Southeast Asian and the Gulf Cooperation Council regions. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(3), 262-279. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.10.001>
- Arafat, M., Black, B. S., Yurtoglu, B. B. (2017). The Effect of Corporate Governance on Firm Value and Profitability: Time-series Evidence from Turkey. *Emerging Markets Review*, 30, 113-132. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2016.10.001>
- Baber, W. R., Liang, L., & Zhu, Z. (2012). Associations between Internal and External Corporate Governance Characteristics: Implications for Investigating Financial Accounting Restatements. *Accounting Horizons*, 26(2), 219-237. <https://doi.org/10.2308/acch-10267>
- Basari. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dan Implikasinya terhadap Asimetri Informasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 52-75.
- Brada, J. C. (2016). Corporate Governance Following Mass Privatization. *Journal of Comparative Economics*, 44(4), 1132-1144. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2016.10.003>
- Bushee, B. J., Carter, M. E., & Gerakos, J. (2014). Institutional Investor Preferences for Corporate Governance Mechanisms. *Journal of Management Accounting Research*, 26(2), 123-149. <https://doi.org/10.2308/jmar-50550>
- Chapple, L., & Truong, T. P. (2015). Continuous Disclosure Compliance: Does Corporate Governance Matter? *Accounting & Finance*, 55(4), 965-988. <https://doi.org/10.1111/acfi.12071>
- Chauhan, Y., Lakshmi, K. R., & Dey, D. K. (2016). Corporate Governance Practices, Self-dealings, and Firm Performance: Evidence from India. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 12(3), 274-289. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.10.002>
- Detthamrong, U., Chancharat, N., & Vithesonthi, C. (2017). Corporate Governance, Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Thailand. *Research in International Business and Finance*, 42, 689-709. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.011>
- Diallo, B. (2017). Corporate Governance, Bank Concentration, and Economic Growth. *Emerging Markets Review*, 32, 28-37. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2017.05.003>
- Dembo, A. M., & Rasaratnam, S. (2014). Corporate Governance and Disclosure in Nigeria: An Empirical Study. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 164, 161-171. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.064>
- Duong, H. K., Kang, H., & Salter, S. B. (2016). National Culture and Corporate Governance. *Journal of International Accounting Research*, 15(3), 67-96. <https://doi.org/10.2308/jiar-51346>
- Elfeky, M. I. (2017). The Extent of Voluntary Disclosure and Its Determinants in Emerging Markets: Evidence from Egypt. *The Journal of Finance and Data Science*, 3(1-4), 45-59. <https://doi.org/10.1016/j.jfds.2017.09.005>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency Problems and Residual Claims. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 327-349. <https://doi.org/10.1086/467038>
- Fitria, A. N. (2012). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Aktivitas Dewan terhadap Voluntary Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(4), 1-11.
- Harun. (2013). Is Corporate Governance Relevant? How Good Corporate Governance Practices Affect Indonesian Organizations. *Bulletin of Indonesian Econom-*

- ic Studies*, 49(2), 246-247. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.809848>
- Huang, X., & Kang, J. K. (2017). Geographic Concentration of Institutions, Corporate Governance, and Firm Value. *Journal of Corporate Finance*, 47, 191-218. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.09.016>
- Hui, K. W., & Matsunaga, S. R., (2015). Are CEOs and CFOs Rewarded for Disclosure Quality? *The Accounting Review*, 90(3), 1013-1047. <https://doi.org/10.2308/accr-50885>
- Ibrahim, M., Solikahan, E., & Widyatama, A. (2015). Karakteristik Perusahaan, Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 99-106. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6008>
- Kim, Y. (2015). Discussion of Foreign Ownership and Real Earnings Management: Evidence from Japan. *Journal of International Accounting Research*, 14(2), 215-219. <https://doi.org/10.2308/jjar-10472>
- Kurnianto, S., Sutrisno, & Saraswati, E. (2016). Luas Pengungkapan dan Dampaknya terhadap Asimetri Informasi Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 142-155. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7013>
- Kusumah, R. W. R., & Manurung, D. T. H. (2017). Pentingkah Good Corporate Governance bagi Audit Report Lag? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 137-148. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7045>
- Lee, H., Lee, H. L., & Wang, C. C. (2017). Engagement Partner Specialization and Corporate Disclosure Transparency. *The International Journal of Accounting*, 52(4), 354-369. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.10.001>
- Liang, H. Y., Chen, I. J., & Chen, S. S. (2016). Does Corporate Governance Mitigate Bank Diversification Discount? *International Review of Economics & Finance*, 46, 129-143. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.05.008>
- Liu, S. (2015). Corporate Governance and Forward-looking Disclosure: Evidence from China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 25, 16-30. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2015.10.002>
- Liyundra, F., Sayekti, Y., & Roziq, A. (2017). Determinan Timeliness dan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 528-539. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7071>
- Muawanah, U. (2014). Corporate Governance dan Kepemilikan Keluarga. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 299-313. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5024>
- Murcia, F. D. R. (2016). Discussion of the Determinants of Firm-Specific Corporate Governance Arrangements, IFRS Adoption, and the Informativeness of Accounting Reports: Evidence from Brazil. *Journal of International Accounting Research*, 15(2), 125-128. <https://doi.org/10.2308/jiar-51416>
- Muttakin, M. B., Khan, A., & Belal, A. R. (2015). Intellectual Capital Disclosures and Corporate Governance: An Empirical Examination. *Advances in Accounting*, 31(2), 219-227. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2015.09.002>
- Narayanaswamy, R., Raghunandan, K., & Rama, D. V. (2012). Corporate Governance in the Indian Context. *Accounting Horizons*, 26(3), 583-599. <https://doi.org/10.2308/acch-50179>
- Ntim, C. G. (2016). Corporate Governance, Corporate Health Accounting, and Firm Value: The Case of HIV/AIDS Disclosures in Sub-Saharan Africa. *The International Journal of Accounting*, 51(2), 155-216. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2016.04.006>
- Peters, G. F., & Romi, A. M. (2015). The Association between Sustainability Governance Characteristics and the Assurance of Corporate Sustainability Reports. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 34(1), 163-198. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50849>
- Octavia, E. (2017). Implikasi Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 126-136. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7044>
- Olsen, K. J., & Stekelberg, J. (2016). CEO Narcissism and Corporate Tax Sheltering. *The Journal of the American Taxation Association*, 38(1), 1-22. <https://doi.org/10.2308/atax-51251>
- Rose, C. (2016). Firm Performance and Comply or Explain Disclosure in Corporate Governance. *European Manage-*

- ment Journal*, 34(3), 202-222. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.03.003>
- Sankara, J., Lindberg, D. L., & Razaki, K. A. (2016). Conflict Minerals Disclosures: Reporting Requirements and Implications for Auditing. *Current Issues in Auditing*, 10(1), A1-A23. <https://doi.org/10.2308/cia-51312>
- Sharma, N. (2014). Extent of Corporate Governance Disclosure by Banks and Finance Companies Listed on Nepal Stock Exchange. *Advances in Accounting*, 30(2), 425-439. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2014.09.014>
- Yu, Z., Li, J., & Yang, J. (2017). Does Corporate Governance Matter in Competitive Industries? Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 43, 238-255. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.04.008>

4.2 - Peran Corporate Governance

by Djoko Suhardjanto

Submission date: 31-Jan-2020 10:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 1249110058

File name: 4.2_-_Peran_Corporate_Governance.pdf (480.72K)

Word count: 7128

Character count: 44792

PERAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN VOLUNTARY DISCLOSURE

Rini Fatmawati
Dessy Widya Astuti
Djoko Suhardjanto

Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Surakarta
57126 surel: rinifatmawati1993@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9004>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 9
Nomor 1
Halaman 57-69
Malang, April 2018
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
19 September 2017
Tanggal Revisi:
25 April 2018
Tanggal Diterima:
30 April 2018

Abstrak: Peran Corporate Governance dalam Meningkatkan Voluntary Disclosure. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh sejumlah variabel *corporate governance* terhadap tingkat *voluntary disclosure*. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik dan komite audit berpengaruh terhadap tingkat *voluntary disclosure*. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tuntutan *voluntary disclosure*. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa komite audit berperan untuk menjamin kepatuhan pelaporan keuangan, termasuk *voluntary disclosure*. Meskipun demikian, dewan komisaris dan komisaris independen tidak dapat memengaruhi *voluntary disclosure* karena lebih menekankan pengawasan pada *mandatory disclosure*.

Abstract: The Role of Corporate Governance in Increasing Voluntary Disclosure. The purpose of this study is to examine the effect of a number of *corporate governance* variables on the level of *voluntary disclosure*. Data analysis was done by multiple linear regression test. This study shows that public ownership and audit committee have an effect on *voluntary disclosure* level. These indicate that there is an increase in *voluntary disclosure* demands. In addition, the audit committee acts to ensure compliance with financial reporting, including *voluntary disclosure*. Nevertheless, the board of commissioners and independent commissioners can't influence *voluntary disclosure* because it emphasizes supervision on the *mandatory disclosure*.

Kata kunci: *corporate governance*, *voluntary disclosure*, komite audit, dewan komisaris

Beberapa tahun terakhir terdapat masalah mengenai keluasan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI, yaitu masih relatif belum luas yang seringkali mengakibatkan kerugian bagi pemangku kepentingan. PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) adalah contoh kasus yang melanggar prinsip keterbukaan (*disclosure*). Kasus berikutnya, Basari (2013) mengemukakan mengenai masalah keterbukaan informasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Davomas Abadi Tbk. Skandal tersebut jelas melanggar prinsip keterbukaan informasi secara penuh dan konsistensi (*full disclosure*) di pasar modal. Peraturan mengenai keterbukaan informasi bersandar pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur mengenai Pasar Modal menyebutkan bahwa masyarakat

berhak mengetahui kondisi perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian pada investor. Dari fenomena tersebut peran informasi sebagai produk utama yang dihasilkan melalui laporan keuangan perusahaan sangat penting sebagai tanda atau sinyal yang mempengaruhi keputusan investasi pihak di luar perusahaan dan informasi yang diberikan kepada publik lebih komprehensif mengenai kondisi perusahaan. Kasus tersebut juga mengindikasikan terjadinya asimetri informasi antara *principles* dengan *agent*. Oleh sebab itu pengguna informasi sangat membutuhkan informasi yang transparan, terutama pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Informasi yang transparan dan lebih komprehensif akan membantu pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkembangan in-

vestasi masa depan pada perusahaan terkait.

Penelitian-penelitian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *voluntary disclosure* sudah banyak, misalnya Ibrahim, Solikahan, & Widyatama (2015), Muawanah (2014), Muttakin, Khan, & Bellal (2015), serta Yu, Li, & Yang (2017). Penelitian tersebut menemukan hasil yaitu pro-porsi kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh pada keterbukaan informasi. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Hui & Matsunaga (2015) dan Kim (2015) bahwa kepemilikan publik mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan informasi.

Detthamrong, Chancharat, & Vithessonthi (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh masyarakat yang semakin tinggi akan berakibat pada tekanan yang tinggi untuk perusahaan agar mengungkapkan informasi yang lebih baik. Kepemilikan saham oleh masyarakat dengan persentase yang lebih-besar juga akan mendorong perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan mengungkapkan informasi yang lebih-banyak yang bertujuan memasarkan sahamnya dan untuk meminimalkan tekanan dari pembuat peraturan (pemerintah).

Penelitian Octavia (2017) dan Kurnianto, Sutrisno, & Saraswati (2016) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, dan *leverage* memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap kualitas *voluntary disclosure*. Akan tetapi, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada kualitas *voluntary disclosure*. Kebaruan penelitian ini menggunakan variabel struktur kepemilikan dan dewan komisaris dengan proksi yang berbeda yang diduga berpengaruh positif terhadap luasnya *voluntary disclosure*. Selain itu, sektor perusahaan dan periode pengamatan menjadi kebaruan penelitian ini. Dalam membuat indeks *voluntary disclosure* suatu instrumen dibutuhkan sehingga dapat menggambarkan informasi secara jelas dan detail pada masing-masing item laporan keuangan sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini menggunakan indeks Wallace dengan melakukan perbandingan antara beberapa informasi yang disajikan oleh perusahaan dengan beberapa informasi yang sebaiknya disajikan oleh perusahaan. Daftar item pengungkapan *voluntary disclosure* mengacu pada Peraturan OJK Nomor.29/PJOK.04/2016.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena *voluntary disclosure* memiliki kandungan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi keputusan penggunanya serta dapat menurunkan asimetri informasi. Hal ini menunjukkan perusahaan berminat untuk menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan untuk memberi sinyal positif bagi perusahaan. *Signalling theory* mendasari pengungkapan sukarela karena sinyal yang berupa informasi mengenai usaha yang telah dilakukan pihak manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal tersebut dapat berupa informasi lain yang menyatakan perusahaan lebih baik daripada perusahaan lain. Manajemen berupaya mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya akan menarik calon investor jika berupa berita bagus. Pengungkapan sukarela yang tertuang pada *annual report* salah satu upaya memberikan sinyal positif kepada pengguna informasi karena didalamnya terdapat informasi keuangan dan non-keuangan.

Sample frame yang digunakan adalah perusahaan tambang yang terdaftar di BEI selama 2014-2016. Pertimbangan memilih perusahaan pertambangan karena perusahaan semacam ini dipercaya membutuhkan image yang lebih baik dari investor dan pemangku kepentingan (Kim, 2015). Penelitian Sankara, Lindberg, & Razaki (2016) mengungkapkan bahwa industri pertambangan memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan sektor industri lainnya. Karakteristik dan sifat perusahaan pertambangan yaitu untuk berinvestasi memerlukan biaya yang besar dengan sarat risiko dan jangka waktu yang lama, serta tingginya ketidakpastian, karena perusahaan pertambangan juga merupakan perusahaan yang dalam kegiatannya melakukan pengelolaan sumber daya dan transaksi ekonomi yang melibatkan banyak pihak yaitu pemangku kepentingan (*supplier*, kreditur, konsumen, calon investor, dan lain-lain). Perusahaan pertambangan juga melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pihak sehingga cenderung berisiko dan tekanan yang timbul juga banyak. Kondisi tersebut mengharuskan perusahaan pertambangan memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak. Dengan *voluntary disclosure* informasi yang dihasilkan dapat membantu untuk pengambilan keputusan investasi-

si. Periode penelitian tahun 2014 sampai dengan 2016 dipilih karena pada periode tersebut industri pertambangan mengalami naik turun seiring adanya gejolak ekonomi di Indonesia (www.worldbank.org, 2014).

Sepanjang tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan ekonomi melemah dan perusahaan tambang pun ikut terkena dampak (www.ekonomi.kompas.com). Gejolak politik yang terjadi seringkali membuat menurunnya kepercayaan pada para investor yang mengakibatkan juga tertundanya sejumlah proyek dan investor baru. Tak hanya itu, rupiah pun terus melemah menyebabkan pemerintah menurunkan subsidi bahan bakar minyak. Walaupun harga menurun, sebagian besar produsen Indonesia tetap meningkatkan produksi guna menjaga kestabilan pada konsumen. Dengan berjalannya waktu perekonomian di Indonesia, khususnya sektor pertambangan, mulai meningkat. Pada tahun 2015 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan bahwa sektor pertambangan menyerap investasi terbesar pada periode Januari-Maret 2015 yaitu sebesar Rp 15 triliun atau 12% dari realisasi penanaman modal kuartal I tahun 2015 (Kim, 2015). Dari peristiwa tersebut diharapkan perusahaan dapat lebih mengungkapkan secara sukarela informasi risiko perusahaannya yang disajikan dalam annual report. Hal tersebut guna memudahkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan investasi. Tujuan penelitian ini yaitu menguji variabel struktur kepemilikan dan dewan komisaris sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi luas *voluntary disclosure*. Struktur kepemilikan diwakili oleh kepemilikan publik, sedangkan dewan komisaris diwakili oleh jumlah anggota dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit di dalam suatu perusahaan.

METODE

Penelitian ini menguji teori dengan menggunakan variabel-variabel penelitian secara kuantitatif, selanjutnya mengolah data dengan prosedur statistik sehingga dapat disebut dengan penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan sebab-akibat atau kausal di antara variabel penelitian untuk dilakukan pengujian terhadap teori (Winarno, 2007). Data panel digunakan dalam penelitian ini yaitu kolaborasi antara *data time series* (observasi beberapa periode) dan

cross section (pengamatan satu periode).

Populasi yang digunakan yakni semua perusahaan tambang yang terdaftar di BEI untuk periode 2014-2016. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam menentukan *sample frame* penelitian. Maksud dilakukan penelitian ini yakni menguji variabel pengungkapan (*disclosure*) sehingga dibutuhkan perusahaan yang melakukan *voluntary disclosure* melalui laporan keuangan dan laporan tahunan dan dapat diakses melalui website. Sample design yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyelidiki pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang peneliti ajukan. Variabel dependen adalah *voluntary disclosure* yang diprediksi oleh variabel independen adalah kepemilikan publik, dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan komite audit. Kemudian *sample frame* yang digunakan terdiri dari 33 perusahaan pertambangan yang telah melalui kriteria dan terdaftar di BEI periode 2014-2016 (3 tahun). Jadi, *sample size* dalam penelitian ini berjumlah 99 sampel laporan tahunan perusahaan. Sumber data menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui akses *website* resmi dari tiap perusahaan yang termasuk *sample frame* dalam penelitian, juga didapatkan mengakses situs resmi www.idx.co.id. Proporsi kepemilikan publik adalah variabel independen yang pertama yang menunjukkan persentase kepemilikan masyarakat di luar dari kepemilikan manajerial dan institusional (Fitria, 2012). Penelitian ini menekankan pada kepemilikan saham publik sesuai dengan penelitian Arafat, Black, & Yurtoglu (2017) serta Lee, Lee, & Wang (2017). Kepemilikan saham publik diprosikan dari perbandingan kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat dan total saham yang dimiliki perusahaan yang beredar kemudian dikalikan 100% (Peters & Romi, 2015). Variabel independen yang kedua yaitu jumlah dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris yang menjalankan tugas dan fungsi *monitoring* perusahaan secara efektif di dalam suatu perusahaan (Sharma, 2014). Penelitian ini menggunakan *proxy* jumlah dewan komisaris di dalam suatu perusahaan yang berasal dari *intern/ekstern* perusahaan atau yang independen dalam suatu perusahaan dalam menentukan ukuran dewan komisaris. Hal ini tidak berbeda dengan penelitian Abdallah & Ismail (2017) dan Dembo & Rasaratnam (2014).

Variabel yang ketiga yaitu persentase komisaris independen yakni bagian dari anggota dewan komisaris yang independen atau tanpa mempunyai hubungan/afili-asi dengan pihak pengelola perusahaan, dan pemilik saham mayoritas, serta tidak ada hubungan apa pun yang dapat mempengaruhi tindakan independen dalam hal untuk tujuan perusahaan (Baber, Liang, & Zhu, 2012). Pengukuran proporsi komisaris independen menggunakan Indikator yang tidak berbeda dengan penelitian Abdallah & Ismail (2017), Murcia (2016), dan Huang & Kang (2017) yaitu dengan perbandingan proporsi jumlah anggota komisaris yang independen dalam bentuk persentase terhadap jumlah anggota dewan komisaris di suatu perusahaan dengan mengalikan 100%.

Variabel yang keempat adalah jumlah komite audit yaitu semua member komite audit di dalam suatu perusahaan (Elfeky, 2017). Peraturan mengenai eksistensi komite audit dijelaskan pada Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 yaitu perusahaan diwajibkan memiliki komite audit yang beranggotakan seorang komisaris independen dan paling sedikit dua anggota dari eksternal perusahaan dan/atau tidak terafiliasi dengan perusahaan (di luar emiten). Pengukuran komite audit dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Huang & Kang (2017) yakni dengan menggunakan jumlah seluruh anggota komite audit pada masing-masing perusahaan.

Variabel dependen atau variabel bergantung pada penelitian ini adalah *voluntary disclosure* perusahaan yang dipublikasikan melalui *annual report* perusahaan, yang diprosikan dengan *voluntary disclosure index* (Abdullah, Percy, & Stewart, 2015). Indeks pengungkapan dihitung dengan pembagian antara total *item* pengungkapan sukarela oleh perusahaan terhadap total *item* yang diharapkan diungkapkan oleh perusahaan (Ibrahim, Solikahan, & Widyatama, 2015). Daftar *item voluntary disclosure* disesuaikan dengan standar peraturan di Indonesia yaitu Peraturan OJK Nomor.29/PJOK.04/2016, sesuai dengan penelitian Diallo (2017) dan Harun (2013). Daftar *item voluntary disclosure* tersebut meliputi pengungkapan informasi umum dan strategi, data keuangan, informasi masa depan, dan pengungkapan sosial serta informasi tentang direksi.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol untuk mengendalikan *causal effect* antara variabel dependen dan variabel inde-

penden agar model penelitian lebih lengkap dan lebih baik (Bushee, Carter, & Gerakos, 2014). Hal ini agar tidak ada bias atau kesalahan yang konsisten dalam penelitian. *Size* perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengurangi perbedaan secara signifikan *size* perusahaan yang terlalu besar dengan perusahaan yang terlalu kecil bertujuan untuk membuat data total aset terdistribusi normal, sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Liyundra, Sayekti, & Roziq, 2017). Ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya adalah dengan total aktiva, *net sales*, dan *market capitalization*. *Size* perusahaan dalam penelitian ini diprosikan dari jumlah aset perusahaan dengan *natural logarithm* dengan pertimbangan lebih konstan daripada nilai *market capitalization* dan *net sales* (Duong, Kang, & Salter, 2016).

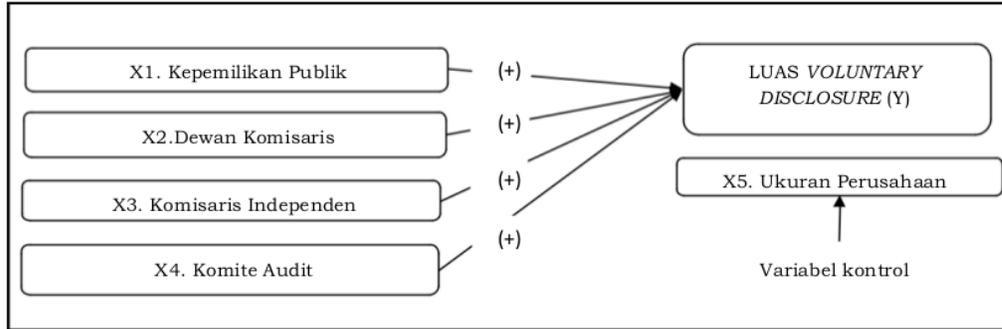
Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan angka menjadi pernyataan yang memudahkan pemahaman pembaca karena penyajiannya lebih ringkas pada tabel sederhana (Murcia, 2016; Peters & Romi, 2015). Uji statistik deskriptif menghasilkan mean, median, standar deviasi, nilai terendah, dan nilai tertinggi. Penelitian ini menguji pengaruh variabel-variabel penelitian dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda, karena untuk menguji pengaruh atau memprediksi variabel-variabel independen pada variabel dependen yang hanya berjumlah satu. Program SPSS tipe 21 untuk *windows* digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel secara statistik. Pengujian regresi linier berganda harus lolos pengujian asumsi klasik yang dimaksud menguji kualitas data seperti kevalidan data penelitian, konsisten, *unbiased*, dan taksiran koefisien regresi efisien. Pengujian asumsi klasik antara lain uji normaitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Model persamaan regresi berganda dalam menguji pengaruh atau memrediksi variabel-variabel independen pada variabel dependen yang hanya berjumlah satu, dalam penelitian ini a ditentukan sebesar 0,05, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{VOLDISC} = \alpha + \beta_1\text{PUBLIK} + \beta_2\text{DEKA} + \beta_3\text{KOMIND} + \beta_4\text{KOMAUD} + \beta_5\text{SIZE} + \epsilon$$

Keterangan:

VOLDISC = Luas *Voluntary disclosure*
 α = Konstanta



Gambar 1. Kerangka Konseptual

- β_{1-5} = Koefisien Regresi
- PUBLIK = Kepemilikan Publik
- DEKA = Jumlah Dewan Komisaris
- KOMIND = Persentase Komisaris Independen
- KOMAUD = Jumlah Komite Audit
- SIZE = Size Perusahaan
- ϵ = error term

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan persentase variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien penentu/determinasi berkisar antara angka nol dan angka satu, artinya jika angka R^2 kecil mendekati angka nol, maka variasi variabel independen menunjukkan persentase sangat terbatas mempengaruhi variabel dependen. Angka R^2 yang besar mendekati angka satu menunjukkan variasi variabel independen berkontribusi besar mempengaruhi variabel dependen. Angka *Adjusted R²* digunakan sebagai nilai koefisien penentu pada penelitian ini.

Pengujian statistik F akan menunjukkan apakah keempat variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian statistik nilai F dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi. Angka probabilitas signifikansi <0,05 artinya keempat variabel independen secara bersamaan menjelaskan

atau mempengaruhi satu variabel dependen secara signifikan. Nilai probabilitas signifikansi >0,05 artinya keempat variabel independen secara simultan signifikan menjelaskan atau mempengaruhi satu variabel dependen.

Uji statistik t menjelaskan besar variabel independen individual mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen yang hanya berjumlah satu. Pengujian statistik t atau *t-test* dalam penelitian ini dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikansi. Angka probabilitas signifikansi <0,05 berarti menunjukkan satu variabel independen mempengaruhi atau sebagai penjelas yang signifikan terhadap satu variabel dependen. Angka probabilitas signifikansi >0,05 berarti menunjukkan satu variabel independen tidak mempengaruhi atau bukan penjelas yang signifikan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode pengamatan yaitu tahun 2014-2016 dijadikan sampel penelitian yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis dan didapatkan sejumlah 99 pengamatan berupa laporan tahunan perusahaan pertambangan selama 3 tahun yaitu periode 2014 -2016 yang digunakan dalam penelitian ini. Pene-

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel

Uraian	Jumlah
Perusahaan sektor pertambangan terdaftar di BEI selama 2014-2016 (42x3th=126)	126
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan periode 2014-2016 secara lengkap (9x3th=27)	-27
Perusahaan yang terpilih menjadi sampel (33x3th=99)	99

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	Min	Max	Rata-Rata	Standar Deviasi
VOLDISC	81,82	100	92,1	3,81
PUBLIK	3	70,58	32	0,44
DEKA	2	9	4,7	1,74
KOMIND	33,33	66,67	44,09	10,34
KOMAUD	2	5	3,06	0,6
SIZE (jutaan)	164.987	87.633.045	1.272.567	1.847.342

litian ini menguji data dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan *software* SPSS versi 21.0 for windows. Adapun sampel lengkap yang dijadikan objek analisis dapat dilihat pada Tabel 1.

Statistik deskriptif menghasilkan nilai rata-rata, nilai paling tinggi, nilai paling rendah, dan standar deviasi untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 menampilkan statistik deskriptif serta semua variabel penelitian yang meliputi baik variabel independen maupun variabel dependen. Berdasarkan uji statistik deskriptif variabel dependen *voluntary disclosure* menunjukkan nilai minimum adalah 81,82 artinya perusahaan paling sedikit mengungkapkan 81,82% dari 33 *item voluntary disclosure* yaitu PT Cita Mineral Investindo, Tbk (CITA). Nilai maksimum menunjukkan 100, artinya perusahaan mengungkapkan paling banyak 100% dari 33 *item voluntary disclosure* yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS). Rata-rata menunjukkan bahwa indeks *voluntary disclosure* sebesar 92,10 dengan standar deviasi sebesar 3,81, berarti rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia mengungkapkan sebesar 92,10% *item* dari 33 *item voluntary disclosure*. Data menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia telah melakukan *voluntary disclosure* cukup tinggi untuk memenuhi informasi kepada publik. *Voluntary disclosure* yang informatif mengacu pada Peraturan OJK Nomor.29/PJOK.04/2016 diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan, sehingga mengurangi informasi yang asimetri dan memberikan sinyal positif bagi pengguna informasi dan membantu investor dalam mempengaruhi keputusan investasi.

Statistik deskriptif untuk variabel independen kepemilikan publik menunjukkan nilai minimum 3% yaitu PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), nilai maksimal 70,58%

PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dan *mean* 32% yang berarti rata-rata kepemilikan publik pada perusahaan pertambangan. Hal ini mengartikan kepemilikan publik masih relatif kecil dan terkonsentrasi. Kepemilikan publik yang semakin besar diharapkan perusahaan dapat memberikan informasi yang lengkap agar meminimalisasi informasi yang asimetri dengan memberikan sinyal positif untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan kepada investor.

Nilai minimum ukuran dewan komisaris (DEKA) pada perusahaan pertambangan di Indonesia menunjukkan 2 orang komisaris pada perusahaan yaitu PT Ratu Prabu Energi Tbk (EMIS), PT ATPK Resources Tbk (ATPK), dan PT J Resources Asia Pasifik (PASB). Nilai maksimum menunjukkan 9 orang komisaris yaitu PT Vale Indonesia Tbk, dan *mean* 4,70 yang mengartikan rata-rata perusahaan pertambangan memiliki 4-5 orang dewan komisaris di dalam perusahaannya. Peraturan mengenai PT dituangkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 diperjelas di pasal 108(5) yaitu mengharuskan perusahaan mempunyai minimal dua orang sebagai anggota dewan komisaris. Hasil data statistik deskriptif menyimpulkan bahwa tidak ada perusahaan yang bertentangan dengan undang-undang terkait kuantitas dewan komisaris di dalam suatu perusahaan. Ukuran/jumlah dewan komisaris merupakan salah satu efektivitas peranan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya mengawasi dan menasihati perusahaan.

Proporsi komisaris independen (KOMIND) menunjukkan nilai minimum 33,33, artinya perusahaan paling sedikit memiliki proporsi komisaris independen 33,33% dari jumlah anggota dewan komisaris yaitu PT Harum Energy Tbk (HRUM). Nilai maksimum menunjukkan 66,67, artinya perusahaan paling banyak memiliki komisaris independen 66,67% dari jumlah anggota dewan komisaris yaitu PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Nilai rata-rata sebesar 44,09 dengan standar

deviasi 10,34 cukup tinggi dan variatif, artinya perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki rata-rata proporsi komisaris independen sebesar 44,09% dari semua anggota dewan komisaris yang ada di dalam perusahaan. Proporsi komisaris independen juga terbukti menunjukkan peningkatan efektivitas kinerja dewan komisaris dalam mengemban tugas utama yaitu fungsi pengawasan (Fama & Jensen, 1983), sehingga diharapkan persentase komisaris independen yang lebih tinggi juga berdampak semakin efektif fungsi monitoring di dalam perusahaan.

Komite audit (KOMAUD) menunjukkan nilai minimum 2, artinya paling sedikit perusahaan mempunyai 2 orang anggota komite audit dalam perusahaan yaitu PT Harum Energy Tbk (HRUM). Nilai maksimum menunjukkan 5, artinya paling banyak perusahaan mempunyai 5 orang anggota komite audit yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS). Rata-rata menunjukkan 3,06 dengan standar deviasi sebesar 0,6 sangat kecil dan variatif, artinya rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia mempunyai 3 orang member komite audit dalam perusahaannya. Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 mengatur komite audit di dalam perusahaan paling tidak ada seorang Komisaris Independen dan paling sedikit dua anggota lain berasal dari eksternal perusahaan atau tidak terafiliasi dengan perusahaan (luar emiten). Dari hasil data di atas terungkap bahwa tidak ada perusahaan pertambangan di Indonesia yang melanggar peraturan tersebut karena semua perusahaan sampel mempunyai jumlah anggota komite audit yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Jumlah komite audit menentukan efektifitas kerja dan kinerja komite audit (Kusumah & Manurung, 2017). Oleh karena itu, diharapkan semakin banyak anggota komite audit kinerjanya juga semakin efektif.

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah size perusahaan dengan merujuk pada penelitian terdahulu. Ukuran perusahaan menunjukkan nilai minimum 164.987, artinya paling sedikit perusahaan memiliki total aset 164 Miliar yaitu PT Harum Energy Tbk. Nilai maksimal menunjukkan 87.633.045, artinya perusahaan paling banyak mempunyai total aset sebesar 87 Triliun yaitu PT Adaro Energy Tbk. Rata-rata menunjukkan 1.272.567, artinya rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia mempunyai total aset sebesar 1,3 Triliun yang tergolong klasifikasi perusahaan be-

sar. Ukuran perusahaan yang semakin besar, maka makin besar tuntutan *voluntary disclosure* yang menghasilkan informasi yang relevan agar meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan bagi pengguna.

Kualitas data diuji dengan analisis model regresi linier berganda sehingga estimasi hasil yang signifikan penelitian ini dapat dimanfaatkan secara representatif. Model regresi dikatakan baik dan tidak menyimpang apabila lulus dari pengujian asumsi klasik dasar regresi yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Ghozali, 2013). *Normality test data* dilakukan *Kolmogrov-Smirnov (K-S) Test* dengan hasil menunjukkan 0,950 dan tingkat signifikan pada 0,327, artinya jika $>0,05$ menunjukkan data berdistribusi normal. Uji multikolinieritas memperlihatkan tidak ada hubungan di antara keempat variabel independen. Uji autokorelasi memperlihatkan angka probabilitas sebesar 0,189 yaitu $>0,05$. Hasil ini menunjukkan tidak ada autokorelasi di antara keempat variabel independen pada model regresi dalam penelitian. Uji heteroskedastisitas menunjukkan pola yang teratur sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini sudah lulus uji asumsi klasik sehingga persamaan regresi berganda layak dilanjutkan. Teknik analisis regresi linier berganda adalah teknik analisis data yang dipakai untuk memprediksi variabel-variabel independen sebagai penjelasan terhadap satu variabel dependen. Model regresi linier berganda menghasilkan informasi di antaranya model persamaan linier berganda, nilai koefisien determinasi (R^2), dan pengujian statistik (Uji t dan uji F). Tabel 3 berikut ini memperlihatkan hasil statistik perhitungan model regresi linier berganda.

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut.

$$\text{VOLDISC} = 75,243 + 1,889\text{PUBLIK} + 0,125\text{DEKA} - 6,951\text{KOMIND} + 2,508\text{KOMAUD} + 1,362\text{SIZE}.$$

Pada Tabel 3 dapat dilihat koefisien penentu/determinasi dilihat dari nilai *Adjusted R2* sebesar 0,279. Hasil ini menunjukkan sebesar 27,9% variabel dependen *voluntary disclosure* dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yaitu kepemilikan publik, jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah komite audit, dan *size* perusahaan sebagai variabel kontrol. Selebihnya sebesar 72,1% diprediksi oleh sebab/faktor selain

Tabel 3 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	t	Signifikansi
Konstanta	75,243	10,43	0
PUBLIK	1,889	1,985	0,04
DEKA	0,125	0,553	0,581
KOMIND	-6,951	-1,869	0,065
KOMAUD	2,508	4,383	0,01
SIZE	1,362	2,379	0,019
R ²	0,317		
Adjust R ²	0,279		
F Statistic	8,335		
P	0		

di luar model regresi seperti dalam penelitian ini. Variabel independen yang berjumlah lima secara simultan atau bersama-sama memiliki kontribusi berpengaruh atau sebagai penjelas terhadap *voluntary disclosure* sebesar 27,9%, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain selain model penelitian ini.

Nilai statistik F untuk variabel independen menunjukkan angka 8,335 dengan p menunjukkan 0,000. Dilihat dari angka $p < 0,05$, maka model regresi dapat memprediksi tingkat *voluntary disclosure* dan kelima variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu *voluntary disclosure* atau dapat dikatakan model penelitian *fit*.

Uji t mengukur pengaruh satu variabel independen secara tunggal mempengaruhi atau menjelaskan variabel independen. Uji t dapat dilihat melalui nilai probabilitas signifikansi yaitu dengan melihat perbandingan antara angka signifikansi nilai t dari hasil pengujian regresi berganda dengan nilai signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini. Nilai signifikansi yang dipakai penelitian ini adalah 0,000, artinya jika nilai signifikan $< t$, menunjukkan variabel independen mempengaruhi secara signifikan pada variabel dependen, dan jika nilai signifikansi $> t$, menunjukkan variabel independen bukan penjelas secara signifikan atau tidak mempengaruhi variabel dependen. Nilai signifikansi pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel independen dengan simultan menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen dengan signifikan.

Berdasarkan data pada Tabel 3, pengujian statistik kepemilikan terhadap koefisien regresi menunjukkan angka t sebesar 1,985 serta angka p menunjukkan 0,040. Angka $p < 0,05$ mengartikan hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan kepemilikan publik

mempengaruhi *voluntary disclosure* yang mengarah positif. Temuan ini kongruen dengan penelitian terdahulu yaitu Narayanawamy, Raghunandan, & Rama (2012), Hui & Matsunaga (2015), Kim (2015), Chapple & Truong (2015), dan Rose (2016) dengan hasil proporsi kepemilikan publik mempengaruhi luas *voluntary disclosure*. Kepemilikan saham oleh publik mendorong perusahaan mengungkapkan informasi yang lebih komprehensif pada laporan tahunan/*annual report*. Logika berpikir yaitu publik atau pihak di luar perusahaan yang memiliki kepemilikan saham menginginkan informasi yang komprehensif mengenai perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya. Selain itu, investor mampu mengawasi dan memantau kegiatan manajemen sehingga kepentingannya dalam perusahaan dapat terpenuhi. Publik yang menginginkan informasi yang komprehensif, mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang komprehensif salah satunya *voluntary disclosure* yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan mengingat karakteristik perusahaan pertambangan yang memerlukan biaya besar, risiko, waktu lama, dan ketidakpastian yang tinggi.

Hasil analisis regresi (Tabel 3) ukuran dewan komisaris menghasilkan angka t menunjukkan 0,553 serta angka p menunjukkan 0,581. Angka $p > 0,05$ menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak signifikan mempengaruhi atau bukan penjelas *voluntary disclosure*. Temuan ini tidak sesuai dengan penelitian Liu (2015), Octavia (2017), dan Kurnianto, Sutrisno, & Saraswati (2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempengaruhi tingkat *voluntary disclosure* secara positif. Penelitian ini tidak berbeda dengan hasil Liang, Chen, & Chen (2016) dengan hasil ukuran dewan komisa-

ris tidak mempengaruhi terhadap luas *voluntary disclosure*. Hal ini karena upaya dari pihak manajemenlah yang menyediakan informasi yang bersifat sukarela untuk memberikan sinyal positif dan menunjukkan perusahaannya lebih baik daripada perusahaan lain untuk mempengaruhi keputusan investasi calon investor dan juga berupaya merealisasikan keinginan pemilik.

Pengujian statistik terhadap koefisien regresi menunjukkan hasil nilai t sebesar -1,869 dan angka p sebesar 0,065. Angka p yang melebihi 0,05 menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen secara statistik tidak mempengaruhi atau bukan penjelas yang signifikan pada *voluntary disclosure*. Temuan ini tidak kongkruen dengan penelitian terdahulu seperti Abdallah, Hassan, & McClelland (2015), Ntim (2016), dan Octavia (2017) dengan hasil menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen mempengaruhi *voluntary disclosure* secara signifikan dengan arah yang positif. Penelitian terdahulu yang selaras dengan temuan ini adalah penelitian Olsen & Stekelberg (2016) yang menunjukkan bahwa persentase komisaris independen tidak mempengaruhi luas *voluntary disclosure*.

Alasan yang mendasari bahwa proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi *voluntary disclosure* adalah perusahaan dengan proporsi komisaris independen lebih tinggi tidak menjamin tingkat *voluntary disclosure* yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan komisaris independen lebih berperan memperhatikan mengenai pengungkapan wajib dibanding *voluntary disclosure*. Proporsi dewan komisaris independen yang tinggi tidak selalu menunjukkan independensi dan profesionalitas yang tinggi karena prinsiples memegang kendali perusahaan sehingga proporsi dewan komisaris independen yang ada di dalam perusahaan tidak dapat berkinerja secara optimal. Selain itu, tingginya presentase komisaris independen bila tidak mampu disertai dengan mempertahankan independensi, maka kinerja mereka tidak akan efektif. Perusahaan yang memenuhi kriteria keberadaan proporsi komisaris independen sebesar 30% memungkinkan hanyalah formalitas dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Kebijakan perusahaan dalam menempatkan proporsi komisaris independen sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas operasional perusahaan tambang dengan ketidakpastian yang tinggi dan tentunya memperhatikan

keefektifan dalam pengambilan keputusan. Keberadaan komisaris independen memang sudah diatur jumlahnya oleh OJK, tetapi praktik dalam perusahaan menunjukkan mekanisme yang jelas mengenai bagaimana pemegang saham memilih komisaris independen belum ada sehingga meskipun ada dalam perusahaan penunjukkannya tidak diketahui. Kondisi tersebut, dikhawatirkan ada kemungkinan bagi beberapa pihak untuk memperluas kesempatan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) atau memungkinkan penunjukkan komisaris independen ternyata ada relasi afiliasi dengan perusahaan, sehingga penerapan prinsip-prinsip GCG akan melemah. Kemungkinan selanjutnya adalah keberadaan komisaris independen hanyalah untuk menaati aturan yang telah ditetapkan tanpa mempedulikan efektifitas fungsinya.

Hal ini dapat terjadi karena penunjukan komisaris independen yang berasal dari eksternal perusahaan kurang memiliki pengalaman dalam menangani masalah-masalah khusus yang dihadapi perusahaan. Pengujian statistik terhadap koefisien model regresi menunjukkan nilai t untuk ukuran komite yaitu 4,383 dan nilai p yaitu 0,010. Nilai $p < 0,05$ yang berarti ukuran komite audit mempengaruhi secara signifikan dengan arah yang positif terhadap variabel independen atau dapat diartikan merupakan penjelas dari *voluntary disclosure*. Temuan ini tidak berbeda dengan penelitian-penelitian lain terdahulu seperti Liu (2015) dan Brada (2016) yang menyebutkan ukuran komite audit mempengaruhi luas *voluntary disclosure* secara positif dan signifikan. Adanya komite audit di dalam perusahaan mendukung prinsip pertanggungjawaban/*responsibility* dalam menerapkan *corporate governance* mewajibkan perusahaan memberikan informasi yang transparan dan lengkap. Peran Komite audit terlampau penting dalam menjalankan fungsinya yaitu mengawasi berbagai aspek organisasi meliputi *checking* dan *monitoring* dalam proses pengendalian intern serta kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan. Peran komite audit tidak terlepas dalam hal peningkatan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan serta menjamin *intern control system* yang lebih baik. Perusahaan pertambangan rata-rata mempunyai 3 sampai 4 orang member komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah menaati Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 untuk

ukuran komite audit yang efektif. Ukuran komite audit yang besar menjadikan kinerja semakin efektif sehingga mendukung perusahaan untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan melalui *voluntary disclosure* yang berguna bagi pengguna untuk memutuskan berinvestasi pada perusahaan mengingat tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Size perusahaan yang digunakan sebagai pengontrol hubungan baik variabel dependen maupun variabel independen, signifikan berpengaruh mengarah positif terhadap luas *voluntary disclosure*. Pengujian statistik terhadap koefisien model regresi menunjukkan hasil nilai t untuk *size* perusahaan sebesar 2,379 dengan nilai p adalah 0,019. Nilai $p < 0,05$ ini berarti ukuran perusahaan mempengaruhi *voluntary disclosure*. Hasil tersebut menunjukkan keselarasan dengan penelitian Narayanaswamy, Raghunandan, & Rama (2012), Liu (2015), Octavia (2017) yang memperlihatkan ada hubungan mengarah positif dan signifikan antara *firm size* pada *voluntary disclosure*. Chauhan, Lakshmi, & Dey (2016) menyatakan perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan para *stakeholder*-nya sehingga permintaan informasi juga meningkat. Selain itu, aset perusahaan yang besar dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi bersifat sukarela yang tinggi untuk menarik para investor. Perusahaan besar seperti perusahaan pertambangan menjadi perhatian publik dan *stock market* karena berkaitan erat dengan keputusan investasi yang akan diambil mengenai prospek ke depan perusahaan mengingat *image* perusahaan tambang memerlukan *image* yang lebih baik berkaitan dengan ketidakpastian yang tinggi. Hal ini memberi indikasi bahwa perusahaan dengan *size* besar akan memberikan informasi yang lebih komprehensif apabila perbandingannya dengan perusahaan dengan *size* yang lebih kecil sebagai upaya perusahaan untuk mencapai akuntabilitas publik.

SIMPULAN

Temuan dalam penelitian ini adalah semakin meningkat porsi kepemilikan publik, tuntutan publik untuk mendorong perusahaan meningkatkan *voluntary disclosure* untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan yang berguna bagi pengguna juga semakin besar. Hasil menunjukkan keberadaan dewan komisaris belum menunjukkan kinerja yang efektif dalam melakukan

tugas utama pengawasan karena fungsi pengawasan yang efektif seharusnya meningkatkan *voluntary disclosure* agar pelaporan keuangan lebih kredibel bagi pengguna. Hasil juga mengindikasikan independensi dewan komisaris yang independen dipertanyakan, karena tidak meningkatkan *voluntary disclosure*. Hal ini memungkinkan penunjukan komisaris independen masih terafiliasi dengan perusahaan sehingga kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Padahal, seharusnya keberadaannya mampu meningkatkan *voluntary disclosure* perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa sebaiknya perusahaan memerhatikan jumlah komite audit. Jumlah komite audit menunjukkan keefektifan kinerja dalam hal pengawasan yang berdampak pada luasnya *voluntary disclosure* dalam rangka menghasilkan informasi yang lebih komprehensif yang berguna bagi pengguna.

Simpulan menunjukkan bahwa salah satu mekanisme *corporate governance* terhadap *voluntary disclosure* adalah kepemilikan saham mayoritas yang dapat diketahui pada laporan tahunan perusahaan. Efektivitas pengendalian terhadap proses penyusunan laporan tahunan dapat didukung dengan adanya dewan komisaris yang independen, kompeten dalam bidang keuangan, dan kredibel baik secara individu maupun secara institusi. OJK hendaknya membuat peraturan yang jelas tentang pemilihan dewan komisaris baik dari dalam maupun luar perusahaan agar independensi terjaga dan informasi dari *voluntary disclosure*/pengungkapan sukarela pada laporan tahunan dapat dipercaya dan akurat sesuai dengan konsep GCG, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) atau dapat disingkat dengan (TARIF) karena belum adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana proses penunjukan komisaris oleh pemegang saham sehingga berpotensi adanya praktik KKN. Perusahaan hendaknya juga memerhatikan jumlah anggota komite audit karena dapat membantu pengawasan untuk meningkatkan transparansi perusahaan, termasuk *voluntary disclosure* yang menghasilkan informasi yang lebih komprehensif bagi pengguna. Hasil penelitian yang telah diperoleh tidak lepas dari keterbatasan. Maka, saran untuk *future research* antara lain mekanisme penerapan GCG yang efektif seharusnya lebih kompleks sehingga lebih andal dan menggam-

barkan variabel GCG seperti pendidikan, jumlah *meeting*, dan pengalaman kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdallah, A. L. N., & Ismail, A. K. (2017). Corporate Governance Practices, Ownership Structure, and Corporate Performance in the GCC Countries. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 46, 98-115. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2016.08.004>
- Abdallah, A. A. N., Hassan, M. K., & McClelland, P. L. (2015). Islamic Financial Institutions, Corporate Governance, and Corporate Risk Disclosure in Gulf Cooperation Council Countries. *Journal of Multinational Financial Management*, 31, 63-82. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2015.02.003>
- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2015). Determinants of Voluntary Corporate Governance Disclosure: Evidence from Islamic Banks in the Southeast Asian and the Gulf Cooperation Council regions. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(3), 262-279. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.10.001>
- Arafat, M., Black, B. S., Yurtoglu, B. B. (2017). The Effect of Corporate Governance on Firm Value and Profitability: Time-series Evidence from Turkey. *Emerging Markets Review*, 30, 113-132. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2016.10.001>
- Baber, W. R., Liang, L., & Zhu, Z. (2012). Associations between Internal and External Corporate Governance Characteristics: Implications for Investigating Financial Accounting Restatements. *Accounting Horizons*, 26(2), 219-237. <https://doi.org/10.2308/acch-10267>
- Basari. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dan Implikasinya terhadap Asimetri Informasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 52-75.
- Brada, J. C. (2016). Corporate Governance Following Mass Privatization. *Journal of Comparative Economics*, 44(4), 1132-1144. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2016.10.003>
- Bushee, B. J., Carter, M. E., & Gerakos, J. (2014). Institutional Investor Preferences for Corporate Governance Mechanisms. *Journal of Management Accounting Research*, 26(2), 123-149. <https://doi.org/10.2308/jmar-50550>
- Chapple, L., & Truong, T. P. (2015). Continuous Disclosure Compliance: Does Corporate Governance Matter? *Accounting & Finance*, 55(4), 965-988. <https://doi.org/10.1111/acfi.12071>
- Chauhan, Y., Lakshmi, K. R., & Dey, D. K. (2016). Corporate Governance Practices, Self-dealings, and Firm Performance: Evidence from India. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 12(3), 274-289. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.10.002>
- Detthamrong, U., Chancharat, N., & Vithesonthi, C. (2017). Corporate Governance, Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Thailand. *Research in International Business and Finance*, 42, 689-709. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.011>
- Diallo, B. (2017). Corporate Governance, Bank Concentration, and Economic Growth. *Emerging Markets Review*, 32, 28-37. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2017.05.003>
- Dembo, A. M., & Rasaratnam, S. (2014). Corporate Governance and Disclosure in Nigeria: An Empirical Study. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 164, 161-171. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.064>
- Duong, H. K., Kang, H., & Salter, S. B. (2016). National Culture and Corporate Governance. *Journal of International Accounting Research*, 15(3), 67-96. <https://doi.org/10.2308/jiar-51346>
- Elfeky, M. I. (2017). The Extent of Voluntary Disclosure and Its Determinants in Emerging Markets: Evidence from Egypt. *The Journal of Finance and Data Science*, 3(1-4), 45-59. <https://doi.org/10.1016/j.jfids.2017.09.005>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency Problems and Residual Claims. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 327-349. <https://doi.org/10.1086/467038>
- Fitria, A. N. (2012). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Aktivitas Dewan terhadap Voluntary Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(4), 1-11.
- Harun. (2013). Is Corporate Governance Relevant? How Good Corporate Governance Practices Affect Indonesian Organizations. *Bulletin of Indonesian Econom-*

- ic Studies*, 49(2), 246-247. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.809848>
- Huang, X., & Kang, J. K. (2017). Geographic Concentration of Institutions, Corporate Governance, and Firm Value. *Journal of Corporate Finance*, 47, 191-218. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.09.016>
- Hui, K. W., & Matsunaga, S. R., (2015). Are CEOs and CFOs Rewarded for Disclosure Quality? *The Accounting Review*, 90(3), 1013-1047. <https://doi.org/10.2308/accr-50885>
- Ibrahim, M., Solikahan, E., & Widyatama, A. (2015). Karakteristik Perusahaan, Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 99-106. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6008>
- Kim, Y. (2015). Discussion of Foreign Ownership and Real Earnings Management: Evidence from Japan. *Journal of International Accounting Research*, 14(2), 215-219. <https://doi.org/10.2308/jiar-10472>
- Kurnianto, S., Sutrisno, & Saraswati, E. (2016). Luas Pengungkapan dan Dampaknya terhadap Asimetri Informasi Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 142-155. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7013>
- Kusumah, R. W. R., & Manurung, D. T. H. (2017). Pentingkah Good Corporate Governance bagi Audit Report Lag? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 137-148. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7045>
- Lee, H., Lee, H. L., & Wang, C. C. (2017). Engagement Partner Specialization and Corporate Disclosure Transparency. *The International Journal of Accounting*, 52(4), 354-369. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.10.001>
- Liang, H. Y., Chen, I. J., & Chen, S. S. (2016). Does Corporate Governance Mitigate Bank Diversification Discount? *International Review of Economics & Finance*, 46, 129-143. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.05.008>
- Liu, S. (2015). Corporate Governance and Forward-looking Disclosure: Evidence from China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 25, 16-30. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2015.10.002>
- Liyundra, F., Sayekti, Y., & Roziq, A. (2017). Determinan Timeliness dan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 528-539. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7071>
- Muawanah, U. (2014). Corporate Governance dan Kepemilikan Keluarga. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 299-313. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5024>
- Murcia, F. D. R. (2016). Discussion of the Determinants of Firm-Specific Corporate Governance Arrangements, IFRS Adoption, and the Informativeness of Accounting Reports: Evidence from Brazil. *Journal of International Accounting Research*, 15(2), 125-128. <https://doi.org/10.2308/jiar-51416>
- Muttakin, M. B., Khan, A., & Belal, A. R. (2015). Intellectual Capital Disclosures and Corporate Governance: An Empirical Examination. *Advances in Accounting*, 31(2), 219-227. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2015.09.002>
- Narayanaswamy, R., Raghunandan, K., & Rama, D. V. (2012). Corporate Governance in the Indian Context. *Accounting Horizons*, 26(3), 583-599. <https://doi.org/10.2308/acch-50179>
- Ntim, C. G. (2016). Corporate Governance, Corporate Health Accounting, and Firm Value: The Case of HIV/AIDS Disclosures in Sub-Saharan Africa. *The International Journal of Accounting*, 51(2), 155-216. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2016.04.006>
- Peters, G. F., & Romi, A. M. (2015). The Association between Sustainability Governance Characteristics and the Assurance of Corporate Sustainability Reports. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 34(1), 163-198. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50849>
- Octavia, E. (2017). Implikasi Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 126-136. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7044>
- Olsen, K. J., & Stekelberg, J. (2016). CEO Narcissism and Corporate Tax Sheltering. *The Journal of the American Taxation Association*, 38(1), 1-22. <https://doi.org/10.2308/atax-51251>
- Rose, C. (2016). Firm Performance and Comply or Explain Disclosure in Corporate Governance. *European Manage-*

- ment Journal, 34(3), 202-222. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.03.003>
- Sankara, J., Lindberg, D. L., & Razaki, K. A. (2016). Conflict Minerals Disclosures: Reporting Requirements and Implications for Auditing. *Current Issues in Auditing*, 10(1), A1-A23. <https://doi.org/10.2308/cia-51312>
- Sharma, N. (2014). Extent of Corporate Governance Disclosure by Banks and Finance Companies Listed on Nepal Stock Exchange. *Advances in Accounting*, 30(2), 425-439. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2014.09.014>
- Yu, Z., Li, J., & Yang, J. (2017). Does Corporate Governance Matter in Competitive Industries? Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 43, 238-255. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.04.008>

4.2 - Peran Corporate Governance

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Submitted to Coventry University

Student Paper

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

e. Indikasi Plagiat :

Similarity Index 24%

f. Kesesuaian bidang ilmu :

Topik penelitian sudah sesuai dengan bidang ilmu akuntansi

Surakarta,19 JUN 2020.....

Bb. Sutopo

Prof. Dr. Bambang Sutopo.,M.Com.,Ak

NIP. 195206101988031002

Jabatan : Guru Besar

Pangkat, Gol Ruang : Pembina Utama / IV/e

Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Bidang Ilmu : Akuntansi

*Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

**Coret yang tidak perlu

***Nasional/terindeks di DOAJ,CABI,Copernicus

